

ISSN 1829 - 5789
Jurnal Civics
Media Kajian Kewarganegaraan

Penerbit

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan PPKn
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Penyunting Ahli

Ahmad Syafii Maarif, Prof. Dr (Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta)
Abdul Gafur Da., Prof. Dr. (Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta)
Sri Jutmini, Prof. Dr. (Universitas Sebelas Maret, Surakarta)
Dasim Budimansyah, Prof. Dr. (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)
Warsono, Dr. (Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)
Azwar Ananda, Prof. Dr (Universitas Negeri Padang, Padang)

Ketua Penyunting

Anang priyanto

Sekretaris Penyunting

Mukh. Mardiono

Penyunting Bahasa

Hilili

Penyunting Pelaksana

Cholisin

Marzuki

Nasiwan

Suharno

Samsuri

Distributor

Puji Wulandari

Keuangan & Langganan

Irfan Nur Hayati

Alamat Penyunting & Distrusi

Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telp. +62 274 586168 Ext. 384

Fax. +62 274 548201

e-mail: civics_uny@yahoo.com

Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan terbit dua kali setahun tahun. Terbit pertama kali untuk bulan Juni 2007. Penyunting menerima para akademisi, umum, dan peneliti kajian kewarganegaraan nasional, internasional, dan lingkungan. Terbitnya pendoblingan kewarganegaraan dari aspek aspek politik, hukum, dan lainnya. Untuk Naskah Langganan yang diminta tidak mesti mencantumkan pendapatan persennya. Naskah Langganan yang dibayar akan memeskati ketertarikan penitisan *Jurnal Civics*.

Volume 6, No. 1, Juni 2009

Media Kajian Kewarganegaraan

DAFTAR ISI

Teknologi Pembelajaran: Konsep Dan Aplikasinya Untuk Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Abdul Gafur DA	1
Dimensi Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan Muchson AR.....	16
Mengembangkan Partisipasi Warga Negara dalam Memelihara dan Mengembangkan Sistem Politik Indonesia Cholisin	29
Kontrak Lisensi: Sarana Pengembangan Teknologi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia Setiati Widiastuti	45
Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia Puji Wulandari Kuncorowati	60
Tantangan Kontemporer Organisasi Masyarakat Sipil dalam Gerakan Hak Asasi Manusia Halili.....	76
Urgensi 'Social Capital' Dalam Revitalisasi Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Negeri Yogyakarta Nasiwan	87
Komentar Terhadap Undang-undang Badan Hukum Pendidikan dan Kesiapan UNY Menjadi Badan Hukum Pendidikan Anang Priyanto	96

KONTRAK LISENSI : SARANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Oleh: Setiati Widiastuti

(Dimuat dalam Jurnal CIVICS Volume 6, Nomor 1, Juni 2009)

ABSTRACT

The urgent of information technology for all aspect of live is not a discourse. The necessity of modern and global activities require renewal technology be absolute, consequently there will be new invention, mobilization and transformation are not impossible and its transformation be possible. The phenomenon can enhance globalization of intellectual rights, because of its urgent , information technology presents threatens to intellectual works protected with patents or trade mark (brand).

License is not only alternative to fulfill renewal information technology, but also to protect the "owners" of the technology. Through license contract, basically licensor permits licensee to utilize the technology possessed, as return the licensor receives royalties. In fact, imbalance bargaining position and free / unlimited contract are often used by licensor to "force" restrictive trade clausul which potentially limit licensees freedom as technology receivers. Therefore it is necessary to confirm in goodwill for involved parties as good conduct to license contract making.

Keywords: License contract , intellectual rights, information technology

PENUTUP

Pengembangan teknologi informasi yang menjadi tuntutan dunia global merupakan syarat absolut yang sementara ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Beberapa alternatif ditawarkan untuki memenuhinya, diawali dari melakukan invensi sendiri, memindahkan teknologi sampai dengan alih teknologi. Dua alternatif terskhir tersebut, tak ayal telah menimbulkan ketergantungan besar kepada negara sumber teknologi, yang acapkali dimanfaatkan oleh pemilik teknoigi untuk pendiktean *terms and condition* dalam penyusunan kontrak lisensi.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memerlukan alih teknologi untuk pengembangan negara, harus mempersiapkan sarana prasarana, tata cara lisensi dan pengaturan lainnya untuk keberhasilan proses tersebut. Tanpa aturan dan mekanisme yang memadai,

Indonesia tidak mempunyai kekuatan memaksa investor asing mentransfer teknologinya. Alih teknologi yang acapkali ditawarkan dengan prinsip "take it or leave it", sedikit demi sedikit harus dipangkas dengan penataan dan strategi yang matang. Dominasi pemilik teknologi atau pemberi lisensi harus dikurangi, setidaknya terdapat kesejajaran posisi tawar antara penerima lisensi dengan pemberi lisensi.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyun. (2003). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta. Andi Offset
- Dewi Astuti Mochtar. (2003). *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Gunawan Wijaya. (2001). *Lisensi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Insan Budi Maulana. (2002). *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII.
- _____ (1996). *Lisensi Paten*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Nandang Sutrisno. (2000). *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII.
- Ridwan Khairandi. (2000). *Praktek Perdagangan Restriktif dalam Pengalihan Teknologi melalui Perjanjian Lisensi Paten*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII.
- _____ (2003). *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI
- Sumantoro. (1993). *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*. Bandung. Alumni.
- Tim Lindsay dkk. (2004). *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung. Alumni.
- Todung Mulya Lubis. (1999). *Alih Teknologi: Antara Harapan dan Kenyataan*. Dalam Prisma, Nomor 4 tahun XVI

ISSN 1829 - 5789

Jurnal Civics

Media Kajian Kewarganegaraan

Penerbit

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (PKn dan Hukum)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan PKn dan Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Penyunting Ahli

Ahmad Syafii Maarif, Prof. Dr (Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta)
Abdul Gafur Da., Prof. Dr. (Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta),
Sri Jutmini, Prof. Dr. (Universitas Sebelas Maret, Surakarta)
Dasim Budimansyah, Prof. Dr. (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)
Warsono, Dr. (Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)
Azwar Ananda, Prof. Dr. (Universitas Negeri Padang, Padang)

Ketua Penyunting

Anang priyanto

Sekretaris Penyunting

Mukh. Murdiono

Penyunting Bahasa

Halili

Penyunting Pelaksana

Cholisia

Marzuki

Nasiwan

Suharno

Samsuri

Distributor

Puji Wulandari

Ketutangan & Langganan

Uliah Nur Hayati

Alamat Penyunting & Distrusi

Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telp. +62 274 586168 Ext. 384

Fax. +62 274 548201

e-mail: civics_uny@yahoo.com

Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan terbit dua kali setiap tahun. Terbit pertama kali untuk edisi Juni 2004. Penyunting mengundang para akademisi, guru, dan pemula kajian kewarganegaraan untuk mengirim naskah karangan tentang pendidikan kewarganegaraan dan aspek-aspek politik, hukum, dan etika moral. Naskah karangan yang dimuat tidak mesti mencerminkan pendapat penyunting. Naskah karangan yang dikirim agar mengikuti ketentuan

Volume 7, No. 1, Juni 2010

Media Kajian Kewarganegaraan

DAFTAR ISI

Konsep, Prinsip, dan Prosedur Pengembangan Modul Sebagai Bahan Ajar Abdul Gafur DA	1
Kerja Lapangan dan Simulasi Peradilan Sebagai Metode Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara Eny Kusdarini dan Setiati Widi Hastuti	16
Pengaruh Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dan Pendidikan Interventif Terhadap Karakter Warga Negara Muda (Studi Deskriptif Analitis pada Siswa SMA Negeri 3 Bandung) Ida Rohayani, Achmad Kosasih Djahuri, dan Sapriya	32
Kontribusi Penerapan Model Pembelajaran <i>Card Sort</i> Berbasis Pendekatan <i>Contextual Teaching and Learning</i> Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Kelas VII-C SMPN 1 Cadasari Pandeglang Banten Aina Mulyana	47
Gaya Hidup "Pribatin" Dalam Ajaran Serat Wulang Reh Muchson AR.....	61
Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi Sri Hartini	81
Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Budaya Impunitas Halili	100

KERJA LAPANGAN DAN SIMULASI PERADILAN SEBAGAI METODE PEMBELAJARAN MATA KULIAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Setiati Widiastuti dan Eny Kusdarini

(Dimuat dalam Jurnal CIVICS Volume 7, Nomor 1, juni 2010)

ABSTRAK

Praktek perkuliahaan dewasa ini cenderung menghasilkan lulusan yang mengandalkan penguasaan materi yang bersifat kognitif. Selain itu proses pembelajaran masih diwarnai oleh paradigma *teacher centered learning* yang memposisikan dosen sebagai tokoh sentral. Berangkat dari paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode kerja lapangan dan peradilan semu sebagai model pembelajaran mata kuliah Hukum Administrasi Negara di jurusan PKn dan Hukum UNY, sesuai dengan karakteristik *student centered learning*. Tulisan ini merupakan kajian dari penelitian deskriptif kualitatif yang berobjek model pembelajaran dengan metode kerja lapangan dan bermain peran pada materi Peradilan Tata Usaha Negara. Subjek penelitian adalah seluruh mahasiswa PKnH semester VI yang menempuh mata kuliah HAN pada tahun ajaran 2008/2009. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara induktif, diawali reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, dilanjutkan *display* data dan diakhiri dengan kesimpulan dan verifikasi

Kajian ini menggambarkan bahwa: 1) substansi materi mata kuliah HAN dapat dipergunakan untuk mengembangkan *civic knowledge* yang berkaitan dengan hak-kewajiban serta peran sebagai warga negara yang baik; 2) melalui metode eksplorasi dengan kerja lapangan dan peradilan semu, dapat dikembangkan *civic skills* yang mencakup *intelectual skills* dan *participation skills*; 3) metode kerja lapangan dan peradilan semu cukup signifikan untuk merealisasikan proses pembelajaran aktif, interaktif, dan kontekstual sesuai dengan paradigma *student centered learning*.

Kata kunci: kerja lapangan, simulasi peradilan, civic skills, student centered learning

PENUTUP

Di penghujung tulisan ini dapat disampaikan simpulan bahwa proses pembelajaran searah dalam paradigma *teacher centered learning*, menyebabkan apatisme mahasiswa. Selain itu kemampuan konseptualisasinya menjadi terbatas, karena mahasiswa belajar dalam struktur dan pengarahannya yang kaku, sehingga mahasiswa tidak dapat *think outside the box*, akibat lebih jauh mahasiswa akan selalu tertinggal di belakang dan tidak mudah melakukan adaptasi dengan dinamika jaman. Untuk mengatasinya, proses pembelajaran perlu diubah, dari searah menjadi dua arah dengan menempatkan mahasiswa sebagai subyek didik yang aktif dan mandiri. Dan, metode eksplorasi melalui kerja lapangan dan peradilan semu dirasa cukup signifikan untuk merealisasikan proses pembelajaran yang aktif, interaktif, mandiri dan kontekstual, sesuai dengan paradigma *student centered learning*.

Hal ini sejalan dengan empat pilar pendidikan standar UNESCO yang menghendaki suatu pembelajaran idealnya dapat memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa, yang mencakup *learning to do, learning to know, learning to be, and learning to live together*. Untuk menghasilkan kompetensi tersebut tentu harus ditempuh dengan strategi dan metode pembelajaran yang memadai, yang lebih menekankan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran. Mahasiswa harus diberdayakan agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalamannya (*learning to do*), dengan meningkatkan interaksi pada lingkungannya baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya, sehingga mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia di sekitarnya (*learning to know*). Diharapkan hasil interaksi dengan lingkungannya itu dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan dirinya (*learning to be*). Kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu atau kelompok yang bervariasi (*learning to live together*) akan membentuk kepribadiannya untuk memahami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad. Rooijackers, 1982; *Mengajar Dengan Sukses Petunjuk Untuk Merencanakan dan Menyampaikan Pengajaran*, Gramedia, Jakarta;
- Cholisin, 2004, "Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan". *Jurnal Civics*, Vol. 1, No.1, Juni 2004

- Eny Kusdarini, 2002; *Hukum Administrasi Negara (Bahan Kuliah)*, Program Studi PPKN FIS UNY, Yogyakarta;
- Dasim Budimansyah, 2003; *Model Pembelajaran Berbasis Portofolio Sosiologi*, Genesindo, Bandung;
- Harsono. 2006. *Student Centered Learning* di Perguruan Tinggi. Pusat Pengembangan Pendidikan Gadjah Mada. Yogyakarta
- Indroharto, 2004; *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;
- Muchson, 2004, Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, *Jurnal Civics*, Vol. 1, No.1, Juni 2004
- S. Nasution, 1989; *Kurikulum dan Pengajaran*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Suharsimi Arikunto, 1993; *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Zairin Harahap, 2007; *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

JURNAL PENELITIAN

Humaniora

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	iii
Pelatihan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan Kelompok Pengangguran <i>Oleh: Ibnu Syamsi</i>	1-18
Peran BUMN dalam Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah <i>Oleh: Purwanto</i>	19-32
Pengaruh Personal <i>Job Fit</i> terhadap Hubungan Desain Kerja dan Kinerja Pengajar <i>Oleh: Setyubudi Indartono</i>	33-56
Kajian Perlindungan Hak Pasien sebagai Pencegahan Malpraktek Medik <i>Oleh: Setiati Widihastuti</i>	57-74
Semangat Kerja Masyarakat Kabupaten Bantul <i>Oleh: Nahiyah J. Faraz</i>	75-88

Isu Kesetaraan dan Keadilan Gender: Studi Kasus Novel Geni Jora Karya Abidah El-Khalicq <i>Oleh: Wiyatni</i>	89-104
<i>Single Professiona! Women</i> sebagai Fenomena Gaya Hidup Baru di Masyarkaat (Studi Kasus: Kabupaten Sleman) <i>Oleh: Dyah Kunalasari</i>	105-124
Biodata Penulis	125-126

KAJIAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN SEBAGAI PENCEGAHAN MALPRAKTEK MEDIK

Oleh : Setiati Widiastuti

(Dimuat dalam Jurnal Humaniora Volume 13, Nomor 2, Oktober 2008)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realisasi perlindungan pasien di Rumah Sakit Dr Sardjito dan mengungkap tanggapan kalangan medis RS Dr. Sardjito terhadap dugaan malpraktek serta alasan mengapa praktek kedokteran berkembang menjadi paktek defensif.

Penelitian yang dilakukan di RS Dr. Sardjito ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian berjumlah 6 orang yang ditentukan secara *purposive*, meliputi: Direktur RS Dr. Sardjito, Ketua IDI Propinsi DIY, dan 4 orang dokter spesialis. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis induktif

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: (1) Perlindungan terhadap pasien antara lain diwujudkan dengan adanya hak atas informasi dan persetujuan pasien atas tindakan medis. (2) Pemberitaan malpraktek di media massa ditanggapi kalangan medis sebagai kesalahan masyarakat dalam memberi label. Publikasi tuduhan malpraktek medik ditanggapi sebagai pelanggaran asas praduga tidak bersalah, dan pencemaran nama baik, mengingat penentuan suatu kasus sebagai malpraktek medik harus melalui proses penetapan pengadilan. (3) Kecenderungan kriminalisasi terhadap kegagalan tindakan medik membuka peluang berkembangnya praktek kedokteran defensif. Teknisnya adalah dengan mencantumkan klausula eksonerasi dalam formulir persetujuan tindakan medis, mengalihkan risiko atas tuntutan ganti rugi pada perusahaan asuransi serta bekerja ekstra hati-hati.

Kata Kunci : perlindungan, hak pasien, pencegahan, malpraktek medik

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana disajikan di atas, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: (1) Bahwa ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan, kegagalan tindakan medik, bahkan malpraktek dapat dicegah apabila pihak pasien,

dokter dan rumah sakit saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Realisasi perlindungan hak pasien oleh Rumah Sakit Dr Sardjito dilakukan antara lain dengan mewajibkan dokter memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien, serta memberi kesempatan kepada pasien untuk memilih melalui hak persetujuan atau penolakan atas tindakan medis, (2) Terhadap maraknya tuduhan malpraktek di area publik, ditanggapi kalangan medis sebagai salah dalam me-label, karena malpraktek murni tidak akan banyak ditemui dalam praktek. Tuduhan malpraktek tersebut umumnya bersumber ketidakpuasan pasien atas layanan medis, (3) Kecenderungan kriminalisasi pada kegagalan tindakan medik, memberi inspirasi berkembangnya praktek kedokteran defensif yang dilakukan para dokter untuk melindungi diri dari tuntutan hukum. Praktek defensif ini dimulai dengan mencantumkan klausula eksonerasi dalam formulir persetujuan tindakan medis, dilanjutkan dengan mengalihkan risiko profesinya kepada pihak ketiga yaitu perusahaan asuransi, serta dokter melaksanakan pekerjaannya dengan ekstra hati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Anny Isfandyarie. (2005). *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta. Prestasi Pustaka
- Bambang Poernomo. (2000). *Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pasca Sarjana IKM UGM
- Bondan Agus Suryanto. (2006). *Problematika Profesi Di Bidang Pelayanan Kesehatan*. (Makalah pada seminar tanggal 10 Agustus tentang Aspek Hukum Di Bidang Pelayanan Kesehatan di Fakultas Hukum UGM)
- Chrisdiono M. Achadiyat. (2005). *Mencermati Undang-Undang Praktek Kedokteran Dalam Kompas 15 Januari*
- Fred Ameln. (1991). *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*, Jakarta: Grafitama Jaya
- Hermien Koeswadji. (1994). *Aspek Keperdataan Dalam Gugatan Malpraktek Medik* (Makalah pada Temu Ilmiah tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit di BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta).
- (1998). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Kartono Mohammad. (1992). *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya terhadap Bioetika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Munir Fuady. (2005). *Sumpah Hippocrates – Aspek Hukum Malpraktek Dokter*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Safitri Hariyani. (2005). *Sengketa Medik – Alternatif Penyelesaian Peselisihan Antara Dokter dengan Pasien*. Jakarta: Diadit Media

Veronica Komalawati. (2002). *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wila Candrawila. (2001). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju.